



**PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2021

**BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Pahlawan No.9 Semarang

Telepon 024-8311174 ext.340 Fax.024-8441013

 biropemotdakerjasama@jatengprov.go.id

 @biropemotdaks

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
1.3 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama	4
1.4 Landasan Hukum.....	4
1.5 Sistematika	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis.....	8
2.2 Perencanaan Kinerja.....	9
2.3 Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	12
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	13
3.3 Realisasi Anggaran.....	34
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	36
4.2 Rekomendasi.....	37
LAMPIRAN-	
Perjanjian Kinerja	
RKT / Lain2 yang dianggap perlu	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : RPJMD 2018-2023 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama.....	8
Tabel 2.2 : RENJA 2021 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama.....	9
Tabel 3.1 : Interval Nilai Capaian Kinerja	12
Tabel 3.2 : Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	13
Tabel 3.3 : Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun Sebelumnya	14
Tabel 3.4 : Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir RPJMD.....	15
Tabel 3.5 : Analisis Penyebab Keberhasilan.....	16
Tabel 3.6 : Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	17
Tabel 3.7 : Analisis Program Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	18
Tabel 3.23 : Realisasi Anggaran.....	35

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 : <i>Policy Brief</i> Kerjasama.....	21
Gambar 2 : Unjuk Rasa	26
Gambar 3 : Pembakuan Nama Rupabumi Dalam Sistem Akuisisi Data Toponimi Indonesia.....	27
Gambar 4 : Penegasan Batas Daerah.....	29
Gambar 5 : Dokumen Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.....	29
Gambar 6 : Desk Penyusunan LKPJ 2021.....	30
Gambar 7 : Pelantikan 17 KDH dan Wakil KDH Masa Jabatan 2021-2026 (19 Februari 2021).....	32
Gambar 8 : Ringkasan LPPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.....	33
Gambar 9 : Dokumen Laporan SPM Thn 2020.....	34

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.


Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama Setda mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Tujuan dari penyusunan LKjiP Sekretariat Daerah Kota Semarang adalah untuk memberikan informasi mengenai pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi indikator kinerja, serta penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama Setda melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan LkjIP Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama Setda tentu tidak terlepas dari kekurangan dan kendala yang dihadapi. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan kinerja Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama Setda yang lebih baik lagi. Semoga di tahun mendatang capaian kinerja Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama Setda dapat semakin meningkat.

Semarang, Januari 2022
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,
OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA
SETDA PROV. JATENG



MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680517 198908 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

- a) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- b) Memberikan laporan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
- c) Sebagai bahan bagi penyempurnaan berbagai kebijakan yang akan diperlukan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

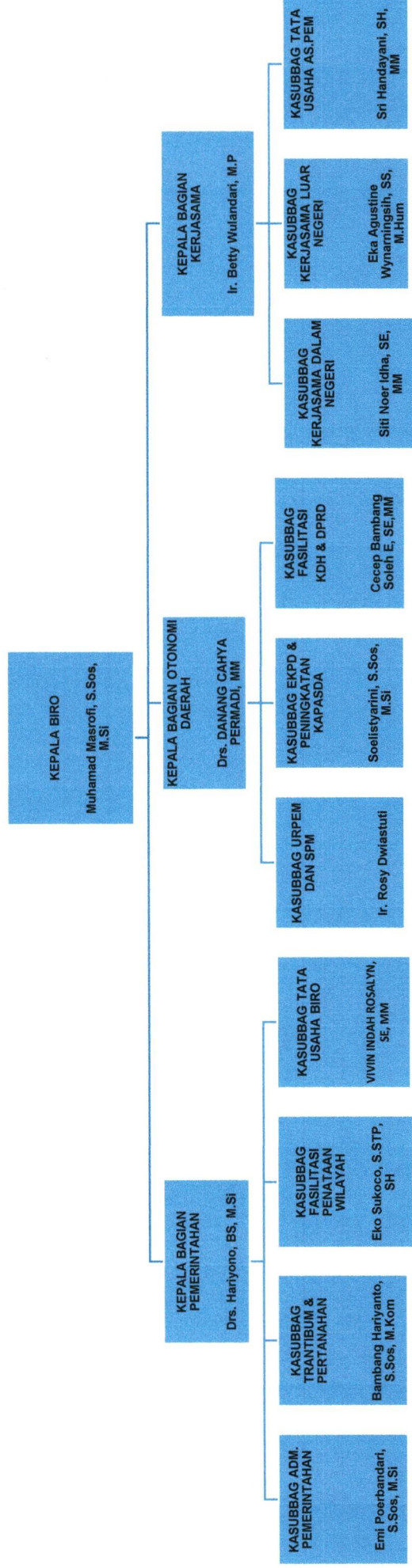
Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan

dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang pemerintahan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama;
4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang pemerintahan;
5. Pelaksanaan fasilitasi sekretariat perangkat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
6. Pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pada bulan Desember Tahun 2021, sumber daya Aparatur Sipil Negara pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berjumlah 46 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Biro (Eselon II), 3 orang Kepala Bagian (Eselon III), 10 orang Kepala Sub Bagian (Eselon IV) dan 32 orang Jabatan Fungsional Umum menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai struktur organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA



1.3 Aspek Strategis & Permasalahan Utama

Dalam pelaksanaan tugas pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang pemerintahan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama pada tahun 2021, terdapat aspek-aspek strategis yang perlu diperhatikan dengan mempertimbangkan profil risiko yang telah teridentifikasi pada Rencana Strategis Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu :

1. Administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal mendorong efektifitas koordinasi berbagai lingkup pemerintahan daerah;
2. Pelaksanaan otonomi daerah belum optimal mendorong efektifitas kerja sama berbagai lingkup pemerintahan daerah;
3. Manajemen secara integratif pelaksanaan tugas perangkat daerah belum optimal sehingga pelaksanaan tugas perangkat daerah belum efektif dan akuntabel.

1.4 Landasan Hukum

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

1.5 Sistematika

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dan ditambahkan solusi kegagalan atau penurunan kinerja sebagai bentuk Rencana Aksi, dari setiap sasaran strategis

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

1) Visi & Misi

Upaya perwujudan visi-misi dan program kerja Gubernur menuntut manajemen pemerintahan daerah yang efektif, efisien serta akuntabel, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, serta pengendalian dan evaluasi. Sekretariat Daerah (Setda) merupakan organisasi yang memiliki peran strategis dalam tata kelola Pemerintahan Daerah khususnya melalui Pengkoordinasian Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah.

2) Tujuan dan Sasaran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 untuk Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
RPJMD 2018-2023
Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah		Persentase Kebijakan yang Efektif	80	81	82	83	84
			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	80	81	82	83	84
			Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	75	76	77	78	79

		Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	85	85	85	85	85
			Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	70	75	80	85	90
		Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	100	100	100	100	100
			Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	100	100	100	100	100

2.2 Perencanaan Kinerja

Sesuai Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Sekretariat Daerah bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
RENJA 2021
Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET (2021)
1	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi			%	85
		Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif			%	80
			Pemerintahan dan Kesta/ Pwmantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (<i>Policy Brief</i>) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Pemerintahan	%	100
				Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti	%	100

2	Meningkat-nya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota			%	100
		Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD			%	100
				Presentase tertib administrasi pemerintahan	%	100
				Presentase pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang sesuai kewenangan di Provinsi Jawa Tengah	%	100
				Presentase rata-rata ketercapaian IKK penyelenggaraan pemerintahan daerah	%	100
				Presentase fasilitasi dokumen administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD	%	100

2.3 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Renja Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 berikut tabel perjanjian kinerja Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	1. Persentase hasil rekomendasi kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	%	85
		2. Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	%	80
2.	Meningkatkan Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3. Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	%	100
		4. Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	%	100

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sampai dengan akhir tahun 2021, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Untuk memudahkan interpretasi pengukuran atas pencapaian kinerja dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

Tabel 3.1
Interval Nilai Capaian Kinerja

NO.	NILAI	KETERANGAN
1.	$\geq 91\%$	Sangat Baik
2.	76 – 90,99%	Baik
3.	66 – 75,99%	Cukup
4.	51 – 65,99%	Kurang
5.	$\leq 50,99\%$	Sangat Kurang

Sesuai Renstra Tahun 2018-2023, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, memiliki tujuan **"Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah"**. Untuk mencapai tujuan tersebut, Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Dan Kerjasama selaku bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki dua sasaran yaitu :

- Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah
- Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam mendukung capaian kinerja Provinsi Jawa Tengah, Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama mempunyai dua sasaran strategis dan empat indikator kinerja sasaran, dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	85%	100%	117%	Sangat Baik	Bag Pemerintahan
		persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	80%	80%	100%	Sangat Baik	Bag Kerjasama
2	Meningkatkan Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	100%	100%	100%	Sangat Baik	Bag Pemerintahan
		Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	100%	100%	100%	Sangat Baik	Bag Otonomi Daerah

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, seluruh indikator sasaran pada Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama realisasi capaiannya dikategorikan sangat baik. Ini dikarenakan seluruh realisasi melampaui target yang telah ditentukan.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	85	100	117	85	100	117	85	100	117
		Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	70	70	100	75	75	100	80	80	100
2	Meningkatkan Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, realisasi kinerja Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 rata-rata capaiannya sebesar 100%. Hal ini dikarenakan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran mencapai target seluruhnya.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan
Target Akhir RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target Akhir 2023	Capaian %	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	100%	85%	117%	Tercapai
		Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	80	85%	100%	Tercapai
2	Meningkatkan Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	100%	100%	100%	Tercapai
		Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	100%	100%	100%	Tercapai

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, realisasi kinerja Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama Tahun 2021 terhadap Target Akhir RPJMD rata-rata tercapai 100%. Hal ini dikarenakan, capaian masing-masing indikator sasaran telah tercapai 100%.

Tabel 3.5
Analisis Penyebab Keberhasilan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan	Solusi
1	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	85%	100%	117%	Karena target 1 dokumen dan terlaksana 1 dokumen	-
		persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	80%	80%	100%	Naskah kerjasama telah ditindaklanjuti	-
2	Meningkatkan Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	100%	100%	100%	Dokumen kebijakan telah disusun tepat waktu	-
		Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	100%	100%	100%	Dokumen kebijakan telah disusun tepat waktu	-

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, keberhasilan kinerja masing-masing indikator pada Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama Tahun 2021 didukung oleh terlaksananya kegiatan pada tiap-tiap indikator kinerja antara lain tersusunnya dokumen *Policy Brief*, naskah kerjasama yang telah ditindaklanjuti, tersusunnya dokumen kebijakan administrasi pemerintahan Kab/Kota serta dokumen pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 3.6
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
1	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	85	100	117	15.017.000	15.017.000	100	0%
2	persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	80	80	100	1.155.931.697	1.162.044.000	99,56	0,44%
3	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	100	100	100	818.272.000	811.890.583	99,11	0,89%
4	Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	100	100	100	1.189.356.000	1.180.897.549	99,35	0,65%

Berdasarkan tabel diatas disimpulkan bahwa capaian realisasi anggaran atas pencapaian 4 indikator sasaran pada tahun 2021 sebesar Rp.3.163.736.829,- (99,34%). Capaian realisasi anggaran ini menurun 0,10% dari tahun 2020 sebesar 99,44%. Penurunan ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

Tabel 3.7
Analisis Program Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian
Pernyataan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	117%	Pemerintahan dan Kesra/ Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (<i>Policy Brief</i>) Bidang Pemerintahan	117%	Menunjang
		persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif			Jumlah dokumen rumusan kerjasama luar negeri	100	Menunjang
					Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan kerjasama dalam negeri	100	Menunjang
					Jumlah naskah kerjasama dalam negeri	272	Menunjang
					Persentase layanan ijin perjalanan dinas dan bukan dinas Luar Negeri	100	Menunjang
	Meningkatkan Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota			Jumlah dokumen basis data rupabumi/ toponimi yang disusun	100	Menunjang
					Jumlah dokumen kode dan data wilayah administrasi pemerintahan	100	Menunjang

					Jumlah dokumen penegasan batas daerah	100	Menunjang
					Jumlah laporan evaluasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	100	Menunjang
					Jumlah dokumen fasilitasi masalah pertanahan/konflik pertanahan	100	Menunjang
					Jumlah laporan mediasi konflik dan unjuk rasa	100	Menunjang
		Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD			jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK	100	Menunjang
					Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Pilihan sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK	100	Menunjang
					Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Prov. Jateng dan Kab/Kota	115	Menunjang
					Jumlah dokumen fasilitasi PAW Anggota DPRD	185	Menunjang

					Jumlah dokumen fasilitasi KDH dan Wakil KDH	109	Menunjang
					Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada SPM	100	Menunjang

Berdasarkan tabel diatas, capaian Indikator kinerja sasaran didukung oleh beberapa kegiatan sehingga menunjang keberhasilan tiap-tiap indikator sasaran, antara lain:

- a. Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dicapai melalui kegiatan *policy brief* terkait Kerjasama yang terdiri dari 1 (satu) dokumen *Flyer* Kerjasama antar daerah dengan judul “Kerjasama Antar Daerah Yang Berkelanjutan Merupakan Wujud Lokomotif Pembangunan Menuju Pelayanan Publik Yang Nyata” dan 1 (satu) Dokumen Laporan Kegiatan “Kebijakan *Policy Brief* Bidang Kerjasama Dengan Judul “Kerjasama Antar Daerah Yang Berkelanjutan Merupakan Wujud Lokomotif Pembangunan Menuju Pelayanan Publik Yang Nyata”.

Pembahasan *policy brief* intinya mengenai penyebab terjadinya masalah/isu mengenai pembiayaan diluar yang telah ditanggung Pemerintah.

Samanya. Dengan disusunnya Perjanjian Kerja Sama, maka pelaksanaan kerja sama dapat berjalan dengan efektif. Bagi kerja sama luar negeri yang tahapan proses penetapan dokumen kerja samanya lebih panjang, efektivitas kerjasama diukur dari persentase rumusan kerja sama yang ditetapkan menjadi dokumen kerja sama.

Indikator Sasaran tersebut tercapai melalui Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah didukung oleh Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah dan Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan Badan Usaha Swasta.

Hasil kerja sama dalam negeri selama tahun 2021 telah terlaksananya Rapat Gabungan (Ragab) Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD MPU) XXI Tahun 2021 menghasilkan :

- Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penanganan Bersama Lintas Batas Pandemi Covid-19;
- Perjanjian Kerjasama Penanganan Kesehatan Kasus Covid-19;
- Perjanjian Kerjasama Penegakan Hukum dalam Penanganan, Pengendalian, dan Penanggulangan Covid-19;
- Rencana Aksi Kerjasama Lintas Batas Penanganan Pandemi Covid-19

Selain itu, telah dilakukan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan menghasilkan naskah yang telah ditandatangani terdiri dari:

- Kerjasama antar pemerintah daerah : 20 Kesepakatan Bersama (Jawa Tengah dengan Jawa Barat, Jawa Tengah

dengan Bangka Belitung, Jawa Tengah dengan Kab Blora, dll), 24 Perjanjian Kerjasama (Mall Pelayanan Publik Blora, Jepara, Karanganyar, dll), 1 Adendum Kesepakatan Bersama (Dirjen Perhubungan Udara, Pemprov Jateng, Pemkab Blora tentang Pembangunan dan Pengembangan bandar Udara Ngloram), 3 Adendum Perjanjian Kerjasama (SPAM Regional Kuburejo, dll), dan 1 Pengakhiran Kerjasama (Prov Jateng dengan Pemkab Klaten tentang Pengelolaan Kawasan Rowo Jombor)

- Sinergi dengan Pemerintah Pusat : 19 Nota Kesepakatan (Kemen PUPR, Kemendikbud, Kemenkeu, Polda, Pengadilan Tinggi Agama, dll), 10 Rencana Kerja Narasi (Polda, KPPU, Kementerian PUPR, dll), 10 Rencana Kerja Matrik (Polda, Pengadilan Tinggi Agama, Kementerian PUPR, dll);
- Kerjasama dengan Pihak Ketiga : 5 Kesepakatan Bersama (Shopee, Pertamina, BRI, Unimus, Brilliant e-Commerce), 5 Perjanjian Kerjasama (Brilliant e-Commerce, UNISULA, Shopee, Pertamina, UDINUS), 1 Adendum Perjanjian Kerjasama (Dinas ESDM dengan PT Semarang Mineral Pembangunan).

Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pemerintah luar negeri pada tahun 2021, khususnya di masa pandemi Covid-19 berfokus pada penanganan pengendalian virus corona.

Dalam rangka menumbuhkan kepedulian, empati dan rasa persaudaraan terkait penanganan pandemi Covid-19, Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama ikut berpartisipasi dengan cara menghubungi *Sister Province* Jawa Tengah (Fujian, Queensland, dan Chungcheong Buk Do) untuk dapat

membantu terhadap penanganan pandemi Covid-19 di Jawa Tengah. Hasilnya sebagai berikut :

- Fujian memberikan bantuan 3000 pcs baju kesehatan (hazmat), 2 mesin *airway positive Breathcare* PAP, 5 pcs *patient monitor*, dan 5 pcs *oxygen concentrator*;
 - Queensland rencana dalam bulan Desember 2021 ini akan memberikan bantuan berupa uang tunai senilai AUD\$ 2 Juta (Rp. 20,8 Milyar).
 - Chungcheong Buk Do memberikan bantuan berupa 110.000 pcs masker KF94.
 - *Australia Indonesia Business Council* (AIBC) memberikan bantuan berupa uang tunai Rp. 51.000.000,-.
- c. Indikator Sasaran Persentase efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota, dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Hal ini ditunjang oleh kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah melalui Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah serta Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum.

Pada tahun 2021 telah dilaksanakan fasilitas di bidang pertanahan mengenai Proyek Strategis Nasional maupun tertib administrasi pemerintahan antara lain :

- 1) Fasilitas pengadaan Tanah Jalan Tol Yoyakarta-Bawen;
- 2) Fasilitas persiapan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan Proyek Strategis Nasional antara lain : Bendungan Bener di Kab.Purworejo, pembangunan jalan tol Tanggul Laut Semarang – Demak, pembangunan jalan tol Solo-Jogja, Irigasi Slinga Purbalingga

- 3) Fasilitasi pengamanan unjuk rasa di lingkungan kantor Gubernur sebanyak 25 kali;
- 4) Penegasan Batas Daerah
 - Usulan revisi Permendagri tentang batas daerah antara Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Pangandaran; Kota Tegal dan Kabupaten Tegal; Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan (Jawa Timur); Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Kulonprogo, Kota Semarang dengan Kabupaten Demak;
 - Kesepakatan penentuan batas pengelolaan sumberdaya alam wilayah laut antara Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat.
- 5) Perapatan Pilar Batas Daerah

Perapatan pilar batas daerah sebanyak 11 pilar tipe B pada segmen Batas Kab. Cilacap dengan Kab. Banyumas.
- 6) Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Disusun Buku Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, dengan masukan untuk penyesuaian nama toponimi desa/kelurahan (dalam rangka revisi Permendagri tentang Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Kepmendagri tentang Kode Desa).
- 7) Basis Data Rupabumi/Toponimi Jawa Tengah

Sosialisasi Aplikasi SAKTI (Sistem Akuisisi Data Toponimi Indonesia) pada 5 Kabupaten/Kota (Kab. Pekalongan, Kab. Karanganyar, Kab. Kudus, Kab. Kebumen dan Kota Pekalongan).
- 8) Pembakuan nama rupabumi Jawa Tengah tahun 2021 sebanyak 1.231 nama rupabumi.

- 9) 1 (satu) Dokumen Pemindahan Ibu kota Kecamatan Bodeh dari Desa Muncang Kab. Pematang ke Desa Jraganan (Perda Kabupaten Pematang No. 4 Tahun 2021 tentang Pemindahan Ibukota Kecamatan Bodeh);
- 10) 1 (satu) Dokumen Rencana Pemekaran Kelurahan Dukuh dan Kelurahan Mangunsari di Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, Terhalang dengan Luasan Wilayah yang Tidak Memenuhi Syarat ($\geq 3\text{Km}$) namun saat ini masih menunggu kebijakan dari pusat;
- 11) 1 (satu) Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Jawa Tengah;
- 12) 1 (satu) Dokumen Laporan Dana Kelurahan untuk Pembangunan Sarana Prasarana dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020;
- 13) 1 (satu) Dokumen Draft LKPJ Gubernur Jawa Tengah tahun 2021;

Gambar 2





Unjuk Rasa

Gambar 3

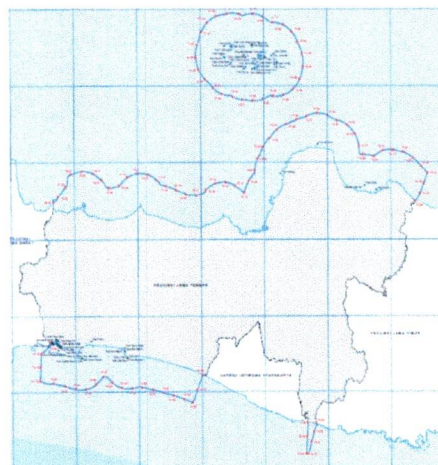
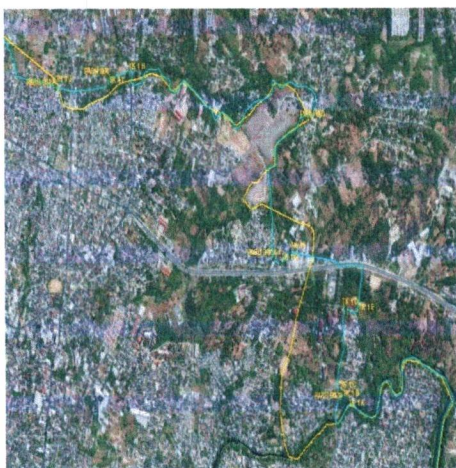
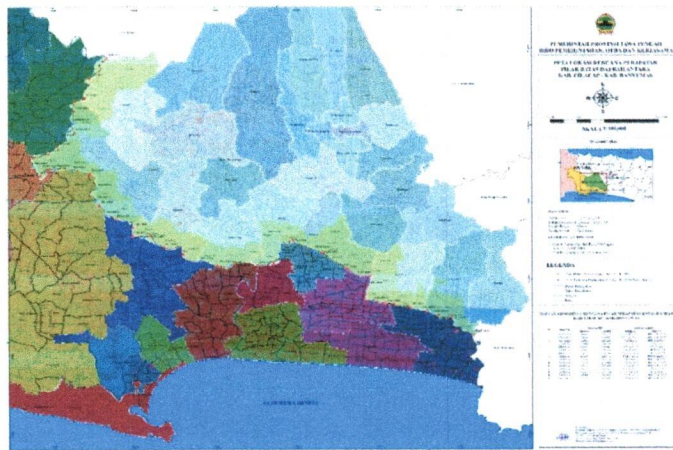
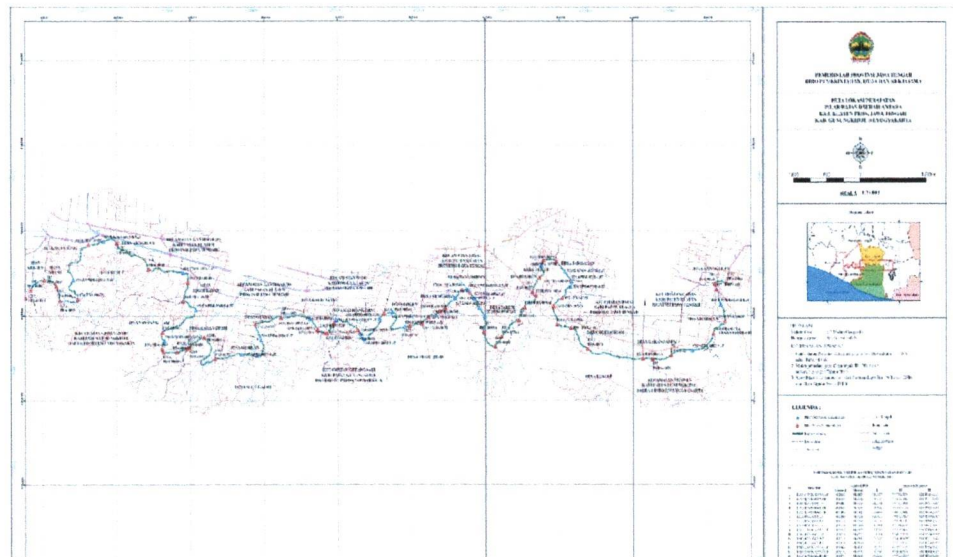
No	Kabupaten/Kota	Jumlah Unsur
1	Kabupaten Cilacap	379
2	Kabupaten Banyumas	376
3	Kabupaten Purwalingga	276
4	Kabupaten Banjarnegara	281
5	Kabupaten Kebumehen	517
6	Kabupaten Puncurejo	164
7	Kabupaten Wonosobo	266
8	Kabupaten Magelang	232
9	Kabupaten Boyolali	192
10	Kabupaten Klaten	48
11	Kabupaten Sukoharjo	35
12	Kabupaten Wonogiri	192
13	Kabupaten Karanganyar	71
14	Kabupaten Sragen	108
15	Kabupaten Grobogan	120
16	Kabupaten Blora	159
17	Kabupaten Bembang	125
18	Kabupaten Pati	178
19	Kabupaten Kudus	75
20	Kabupaten Jepara	164
21	Kabupaten Demak	87
22	Kabupaten Semarang	86
23	Kabupaten Temanggung	160
24	Kabupaten Kendal	128
24	Kabupaten Batang	221
26	Kabupaten Pekalongan	195
27	Kabupaten Pemalang	263
28	Kabupaten Tegal	208

25	Kabupaten Brebes	461
30	Kota Magelang	1
31	Kota Surakarta	3
32	Kota Salatiga	307
33	Kota Semarang	55
34	Kota Pekalongan	2
35	Kota Tegal	615
TOTAL		6.706

(Ctrl)

*Pembakuan Nama Rupabumi
Dalam Sistem Akuisisi Data Toponimi Indonesia*

Gambar 4





Penegasan Batas Daerah

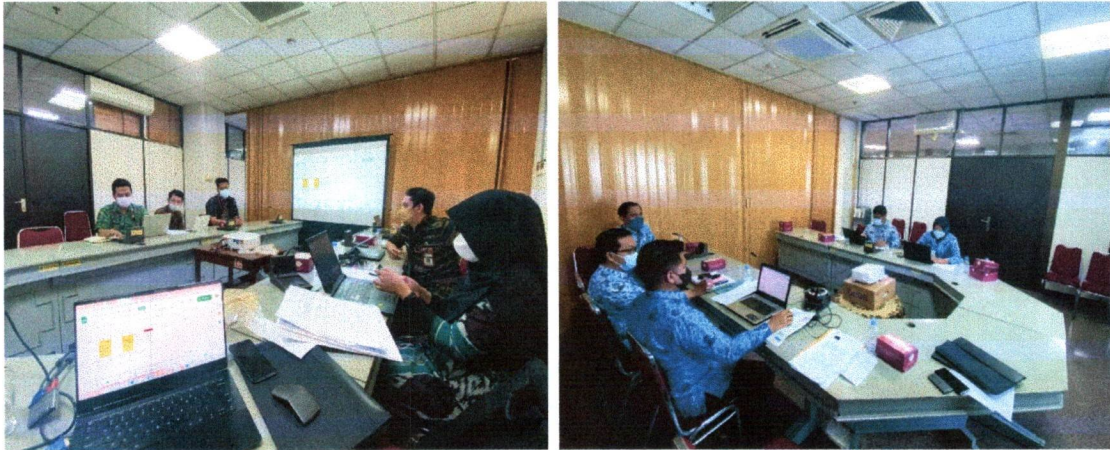
Gambar 5

NO	KODE	KAB/KOTA	JUMLAH			LUAS WILAYAH TAHUN 2021 (Km ²)
			KEC	KEL	DESA	
1	2	3	4	5	6	7
1	33.01	CILACAP	24	15	269	2.861,00
2	33.02	BANYUMAS	27	30	301	1.327,23
3	33.03	PURBALINGGA	18	15	224	777,64
4	33.04	BANJARNEGARA	20	12	266	1.027,85
5	33.05	KEBUMEN	26	11	449	1.281,12
6	33.06	PURWOREJO	16	25	469	1.091,49
7	33.07	WONOSOBO	15	29	236	984,68
8	33.08	MAGELANG	21	5	367	1.085,73
9	33.09	BOYOLALI	22	6	261	1.006,45
10	33.10	KLATEN	26	10	391	655,56
11	33.11	SUKOHARJO	12	17	150	469,12
12	33.12	WONOGIRI	25	43	251	1.824,61
13	33.13	KARANGANYAR	17	15	162	772,78
14	33.14	SRAGEN	20	12	196	941,54
15	33.15	GROBOGAN	19	7	273	1.975,86
16	33.16	B L O R A	16	24	271	1.820,59
17	33.17	REMBANG	14	7	287	1.095,24
18	33.18	PATI	21	5	401	1.504,25
19	33.19	KUDUS	9	9	123	425,15
20	33.20	JEPARA	16	11	184	1.004,13
21	33.21	DEMAK	14	6	243	912,41

22	33.22	SEMARANG	19	27	208	950,21
23	33.23	TEHANGGUNG	20	23	266	868,76
24	33.24	KENDAL	20	20	266	1.027,38
25	33.25	KAB. BATANG	15	9	239	788,26
26	33.26	PEKALONGAN	19	13	272	842,03
27	33.27	PEMALANG	14	11	211	1.115,31
28	33.28	TEGAL	18	6	281	883,33
29	33.29	BREBES	17	5	292	1.662,96
30	33.71	KOTA MAGELANG	3	17	-	18,12
31	33.72	KOTA SLURAKARTA	5	54	-	44,040
32	33.73	KOTA SALATIGA	4	23	-	56,78
33	33.74	KOTA SEMARANG	16	177	-	373,78
34	33.75	KOTA PEKALONGAN	4	27	-	45,25
35	33.76	KOTA TEGAL	4	27	-	39,68
JUMLAH			576	753	7.809	32.883,32

Dokumen Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Gambar 6



Desk Penyusunan LKPJ 2021

- d. Indikator Sasaran Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD, dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Indikator sasaran tersebut ditunjang oleh Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan, serta Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan.

Dicapainya target indikator sasaran ini dilihat dari ketercapaian 100% IKK penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah, difasilitasinya seluruh administrasi Kepala Daerah dan DPRD sesuai jadwal, serta pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang sesuai kewenangan.

Pada tahun 2021, 35 Kabupaten/Kota telah menyusun dan menyerahkan LPPD Tahun 2020 dengan tepat waktu

kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu sampai dengan tanggal 30 Bulan Maret Tahun 2021.

LPPD Tahun 2020 telah disusun dan disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri pada bulan Maret Tahun 2021, sedangkan ringkasan LPPD Tahun 2020 telah disampaikan kepada masyarakat melalui media massa.

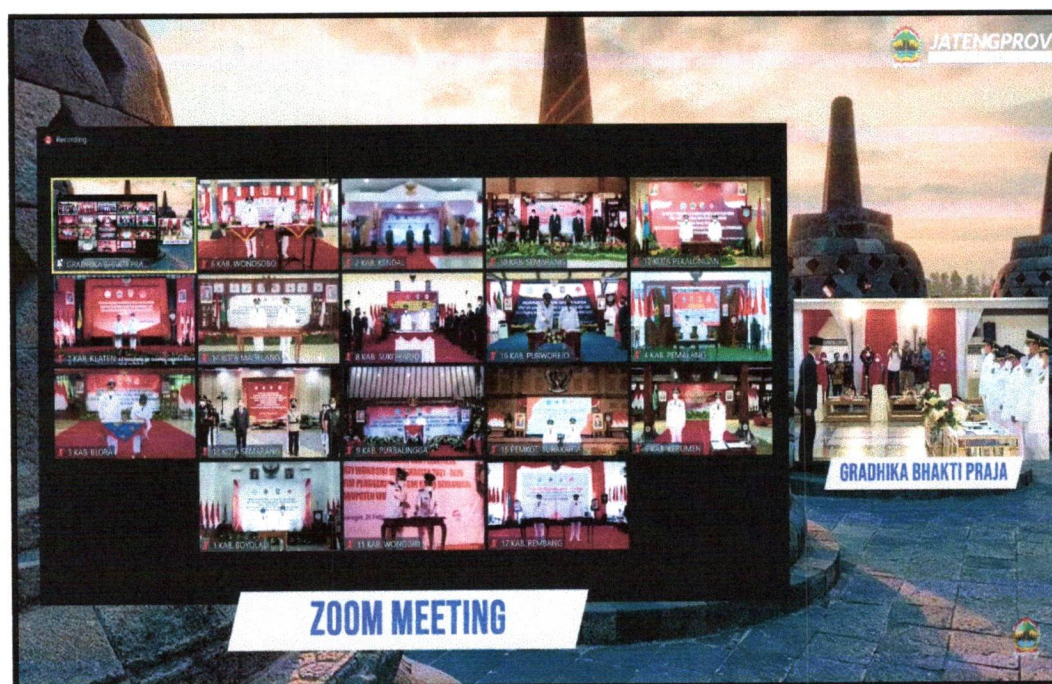
Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memproses 22 usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang ditindaklanjuti dengan pelantikan oleh Gubernur Jawa Tengah, yaitu 21 KDH/Wakil KDH hasil Pilkada Tahun 2020, dan pelantikan Wakil Bupati Kudus (Sdr. Dr. HM. HARTOPO, S.T., M.M, M.H.) menjadi Bupati Kudus sebagai tindak lanjut dari hasil proses hukum mantan Bupati Kudus (Sdr. Ir. H. MUHAMMAD TAMZIL, M.T.).

Proses administrasi pengusulan Penggantian antar waktu DPRD Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada tahun 2021, telah memfasilitasi dan memproses administrasi pengusulan peresmian pemberhentian dan peresmian penggantian antarwaktu DPRD Provinsi serta Pimpinan dan/atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah diterbitkan sebanyak 39 Keputusan Gubernur Jawa Tengah yang terdiri dari 27 anggota DPRD Kab/Kota, dan 8 PAW Pimpinan DPRD Kab/Kota. Selain itu, telah memproses hingga diterbitkan 4 Surat Keputusan Mendagri terkait PAW Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Terkait pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021 telah dilaksanakan penyusunan laporan Penerapan SPM Tahun 2021 Provinsi dan Kab/Kota atas pelaksanaan penerapan SPM Tahun 2020, yang telah

disampaikan kepada Ditjen Bina Bangda Kemendagri, dengan nomor surat: 100/0005109, tanggal 31 Maret 2021; Terlaksananya pengawasan, pembinaan, koordinasi dan sinergitas pelaporan penerapan SPM melalui **SPM-e Jateng** (system berbasisi web) yang dapat di akses melalui <https://biropemotdaks.jatengprov.go.id>; Pengintegrasian aplikasi **SPM-e Jateng** ke dalam aplikasi **e-Database** Sistem Perencanaan Jawa Tengah melalui mekanisme Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (SPLP) yang ditindaklanjuti secara teknis oleh Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah (proses); serta Rencana Aksi Penerapan SPM Provinsi Jawa Tengah, dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100/114 Tahun 2021 tanggal 17 November 2021 tentang Rencana Aksi Penerapan SPM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025.

Gambar 7





Pelantikan 17 KDH dan Wakil KDH Masa Jabatan 2021-2026 (19 Februari 2021)

Gambar 8



Ringkasan LPPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Gambar 9



Dokumen Laporan SPM Thn 2020

Berdasarkan penjelasan terhadap 4 (empat) indikator diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 rata-rata capaian indikator kinerja Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama adalah 104,5%. Capaian ini sama dengan tahun 2020 sebesar 104,5%. Capaian ini ditunjang oleh proses perencanaan dengan memperhatikan evaluasi kegiatan sebelumnya serta proses pengendalian internal.

3.3 REALISASI ANGGARAN

- 1) Pencapaian indikator sasaran **Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi** menggunakan anggaran sebesar Rp.15.017.000,- dari alokasi anggaran senilai Rp.15.017.000,- tidak terdapat efisiensi anggaran karena realisasi anggaran sebesar 100%.

- 2) Pencapaian indikator sasaran **Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif** menggunakan anggaran senilai Rp.1.155.931.697,- dari alokasi anggaran Rp.1.162.044.000,-. Sehingga terdapat efisiensi sebesar 0,44% atau sebesar Rp.6.112.303,-.
- 3) Pencapaian indikator sasaran **Persentase efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kabupaten/ Kota** menggunakan anggaran senilai Rp.811.890.583,- dari alokasi anggaran senilai Rp.818.272.000,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,89% atau senilai Rp.6.381.417,-.
- 4) Pencapaian indikator sasaran **Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD** menggunakan anggaran sebesar Rp. 1.180.897.549,- atau 99,35% dari total pagu Rp. 1.189.356.000,-. Sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 0,65 % atau sebesar Rp.8.458.451,-.

Tabel 3.23
Realisasi Anggaran

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Pemerintahan dan Kesra			
1	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3.169.672.00	3.148.719.829	99,34

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi anggaran atas pencapaian 4 indikator sasaran pada tahun 2021 sebesar **Rp. 3.163.736.829,- (99,34%)**. Capaian realisasi anggaran ini menurun 0,10% dari tahun 2020 sebesar 99,44%. Penurunan ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian indikator kinerja sasaran tahun 2021 sebesar 104,5% (sama dengan capaian Tahun 2020 104,5%), maka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama dikategorikan pencapaian kinerjanya **SANGAT BAIK** sebagaimana olah data berikut :

1. Berdasarkan pengukuran masing-masing capaian indikator sasaran, maka rata-rata capaian indikator sasaran Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama dikategorikan **Sangat Baik (104,5%)** dengan rincian :
 - a) **Sasaran “Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah”** dengan indikator kinerja Persentase hasil rekomendasi kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi realisasi capaiannya sebesar 117% sehingga dikategorikan **Sangat Baik**.
 - b) **Sasaran “Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah”** dengan indikator kinerja Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif capaiannya sebesar 100% sehingga dikategorikan **Sangat Baik**.
 - c) **Sasaran “Meningkatkan Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”** dengan indikator kinerja Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota capaiannya sebesar 100% sehingga dikategorikan **Sangat Baik**.
 - d) **Sasaran “Meningkatkan Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”** dengan indikator kinerja Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan

- kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD capaiannya sebesar 100% sehingga dikategorikan **Sangat Baik**.
2. Hasil capaian realisasi anggaran **Sangat Baik (99,34%)** dengan rincian **Program Pemerintahan dan Kesra** dicapai 99,34% atau **Sangat Baik**.

B. REKOMENDASI

Untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama akan lebih mengoptimalkan fungsi perencanaan anggaran dan pengendalian internal serta meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang lebih baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah kami sampaikan sebagai bahan evaluasi kinerja.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpun 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMAD MASROFI, S.Sos,M.Si
Jabatan : Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUMARNO, SE, MM
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700514 199202 1 001

Semarang, Oktober 2021
Pihak Pertama,
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,
OTONOMI DAERAH DAN
KERJASAMA, SETDA PROV. JATENG

MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680517 198908 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	1) Persentase hasil rekomendasi kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi 2) Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif 3) Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota 4) Persentase terrib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	85 % 80 % 100 %
2.	Meningkatkan Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		100 %

PROGRAM

- 1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

ANGGARAN

(Rp)
3.169.672.000
365.719.000

KETERANGAN

- 3.169.672.000 Sumber Anggaran dari APBD Perubahan Tahun 2021
- 365.719.000 Sumber Anggaran dari APBD Perubahan Tahun 2021

Semarang, Oktober 2021

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH


SUMARNO, SE, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700514 199202 1 001

Pihak Pertama,
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,
OTDA DAN KERJASAMA


MUHAMMAD MASROFI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680517 198908 1 002